



DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) INDUK TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PALEMBANG
2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II. PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN	
2.1 Kondisi Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	4
2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu	4
2.3 Identifikasi Masalah	11
 BAB III. RENCANA KINERJA	13
 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	14
 BAB V. PENUTUP	23

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Induk Tahun 2025 telah diselesaikan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bagi pihak yang berkepentingan dengan senang hati kami menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dikemudian hari.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam penentuan kebijakan pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Palembang, 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DELIAR RIZQON, ST,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711003 200501 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan program yang bersentuhan dengan hajat kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya banyak faktor yang harus mendapat perhatian lebih. Khususnya pada bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dalam pelaksanaan dilapangan diperlukan perlakuan khusus dan kerjasama antar dinas. Hal ini menyangkut kehidupan tenaga kerja (buruh) beserta keluarga dan juga pengusaha (investor) untuk tetap menjaga kelangsungan produksinya.

Masih tingginya jumlah keluarga miskin di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan merupakan tantang tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja untuk memperluas lapangan kerja, kemiskinan dapat dikurangi salah satunya dengan tersedianya tenaga kerja terampil dan lapangan kerja. Selain itu upah yang diterima buruh juga memadai untuk membiaya kehidupan selama satu bulan kedepan disamping jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya serta jaminan kecelakaan kerja. Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dengan diawasinya penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan di perusahaan.

Pembinaan dan pembangunan ketransmigrasian dari tahun ketahun mengalami penurunan penempatan transmigran, hal ini seiring dengan meningkatnya luas perkebunan karet dan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pembinaan tranmsigrasi bagi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang belum diserahkan kepada kabupaten (UPT Serah), selain itu beberapa Dinas Transmigrasi Kabupaten berusaha membuka lahan-lahan tidak produktif menjadi lokasi tranmsigrasi baru.

Program dan kegiatan ketenagakerjaan mendapat dukungan APBN Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan dan APBD Provinsi Sumatera Selatan, bidang ketransmigrasian mendapat dukungan APBN Tugas Pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemanfaatan anggaran mampu memberikan *outcome* positif bagi pekerja dan masyarakat transmigrasi. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di provinsi dan kabupaten / kota, diperlukan laporan pelaksanaan yang memberikan informasi realisasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi. Pelaporan yang disusun dan disampaikan secara rutin juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kementerian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perencanaan Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Memperhatikan undang-undang tersebut dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam rencana kerja pertahun.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan maksud untuk menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk :

1. Memacu atau meningkatkan semangat kerja pada setiap bidang untuk dapat bekerja dan mengelola tugas pokok dan fungsinya di satu pihak dan unsur penunjangnya di lain pihak sehingga mendapatkan suatu kinerja yang dapat diukur.
2. Mengarahkan seluruh staf pada pekerjaan - pekerjaan yang difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi yang pada gilirannya akan dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
3. Mengkoordinasikan rencana kerja ini pada semua Dinas atau Instansi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam mengatasi kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan ;

Bab II Perkembangan dan Permasalahan

Bab III Rencana Kinerja Tahun 2025 ;

Bab IV Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan ditegaskan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 04 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Bertolak dari tugas pokok tersebut, sebagai instansi / dinas yang diharapkan dapat memberikan perkuatan mendukung keberhasilan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi didalam pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama dibidang pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

2.2. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN LALU

Pagu Anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 32.481.654.985,- (*Tiga puluh dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 29.434.455.806 (90,61 %), rincian sebagai berikut sebagai berikut ;

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	Rp. 29.978.541.985,-	Rp. 27.706.690.806,-	92,42
	Belanja Pegawai	Rp. 24.549.258.985,-	Rp. 22.533.535.744,-	91,79
	Belanja Barang dan jasa	Rp. 4.459.783.000,-	Rp. 5.173.155.062,-	116
2.	Belanja Modal	Rp. 2.503.113.000,-	Rp. 1.727.765.000,-	69,02
Total Pagu		Rp. 32.481.654.985,-	Rp. 29.434.455.806,-	90,61

2.2.1. EVALUASI PENCAPAIAN TAHUN 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PLAFON SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
					%	Rp
1	2	3	5	7		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					
07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/ berkembang	100%	31.512.154.985	90,55	28.533.937.314
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	<u>172.943.000</u>	<u>97,09</u>	<u>167.915.258</u>
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	65.000.000	94,76	61.595.086
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	99,87	4.993.300
1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	99,96	4.998.000
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	20.000.000	96,10	19.219.558

1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	77.943.000	98,93	77.109.314
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	<u>25.876.718.985</u>	92,11	<u>23.835.734.604</u>
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	24.365.978.985	91,77	22.360.945.744
1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pemyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Orang	1.317.460.000	98,08	1.292.199.000
1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	183.280.000	94,17	172.590.000
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semestre an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	18	10.000.000	100	9.999.860
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	<u>89.000.000</u>	<u>85,74</u>	<u>76.309.800</u>
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	39.000.000	95,46	37.230.000
1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	50.000.000	78,16	39.079.800
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	<u>1.280.000.000</u>	<u>99,57</u>	<u>1.274.477.927</u>
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	20.000.000	100	20.000.000

1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	1	100.000.000	99,96	99.959.500
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	25.000.000	99,96	24.989.900
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	95.000.000	95,21	90.450.000
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1	120.000.000	99,93	119.915.050
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan yang disediakan	1	20.000.000	99,96	19.991.500
1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	100.000.000	99,52	99.518.000
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	700.000.000	99,95	699.653.477
1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	100.000.000	100	100.000.000
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100%	<u>2.503.113.000</u>	<u>69,02</u>	<u>1.727.765.000</u>
1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1	<u>1.555.000.000</u>	<u>99,88</u>	<u>1.553.150.000</u>
1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2	948.113.000	18,42	174.615.000

1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	100%	<u>880.000.000</u>	<u>89,93</u>	<u>791.414.859</u>
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.000.000	32,23	3.222.900
1.08.02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Yang Dibayar	1	630.000.000	87,18	549.231.959
1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Yang Disediakan	1	240.000.000	99,57	238.960.000
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100%	<u>710.380.000</u>	<u>92,95</u>	<u>660.319.866</u>
1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	310.380.000	95,42	296.161.746
1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	10 Unit	70.000.000	99,66	69.763.000
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Paket	330.000.000	89,21	294.395.120
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	60%	190.000.000	71,05	134.986.384
04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencaker Yang Ditempatkan	80%	120.000.000	54,70	65.645.500
1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi Yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	120.000.000	54,70	65.645.500

04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan Pembayaran Retribusi Daerah	80%	<u>70.000.000</u>	<u>99,06</u>	<u>69.340.884</u>
1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Tahun Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang Telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	13 Kab/Kota	70.000.000	99,06	69.340.884
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	38%	454.500.000	97,86	444.787.171
05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	38 %	<u>179.500.000</u>	<u>96,88</u>	<u>173.905.336</u>
05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Tripartit Yang Dibina	1	179.500.000	96,88	173.905.336
05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK	1 Dokumen	<u>275.000.000</u>	<u>98,50</u>	<u>270.881.835</u>
1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1	275.000.000	98,50	270.881.835

2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Berkurangnya Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	67%	325.000.000	98,69	320.744.937
06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan	120	325.000.000	98,69	320.744.937
1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120	125.000.000	99,87	124.841.429
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5	200.000.000	97,95	195.903.508
JUMLAH				32.481.654.985	90,62	29.434.455.806

2.3 IDENTIFIKASI MASALAH

2.3.1 Masih tingginya pengangguran terbuka

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan khususnya di bidang ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Penganggur terbuka yaitu golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah Angkatan Kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya.

2.3.2 Masih tingginya penduduk yang bekerja dibawah 35 jam per minggu

Disamping masalah pengangguran terbuka, Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan dengan masalah setengah penganggur yang tinggi. Setengah Penganggur yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Apabila masalah pengangguran ini terus meningkat dan tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.3 Masih tingginya pengangguran terdidik (Lulusan SMA/SMK dan S1)

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Tingkat pengangguran terdidik diartikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut.

2.3.4 Masih tingginya angka kemiskinan

Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok dapat disebabkan oleh pengangguran, yang sering disebut-sebut sebagai penyebab utama

kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim dibandingkan banyaknya jumlah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih).

2.3.5 Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja

Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan tenaga kerja adalah belum optimalnya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lembaga Pengujian K3 yang disebabkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum menjadi budaya kerja di perusahaan dan tingkat kompetensi K3 pekerja masih rendah. Permasalahan lain adalah pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 serta penegakan hukum bidang K3 belum secara efektif dilakukan ke semua perusahaan yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah Perusahaan dan Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang ada.

2.3.6 Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Rencana Kinerja 2025 ini.

Target indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Tahun 2024-2026 yaitu:

- Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan sebesar 96,05
- Persentase Tingkat Keberahan Transmigran sebesar 100 %

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 yaitu:

No	Indikator	Target 2025
1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	47 %
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,55 %
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 80.100.000
4	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kerja Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKD, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	43,00 %
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten.Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	47 %
6	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	72 %
7	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunan nya	1 SP
8	Jumlah Satuan Permukiman Yang Dibina	1 SP

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Setiap sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi, serta berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan adalah aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program, kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada masing - masing program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	30,877,593,000
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	250,000,000
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30,000,000
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayan an administrasi perkantoran	100 Persen	26,266,133,000
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang	24,726,133,000
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen	1,300,000,000
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	230,000,000
2	07	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest SKPD dan Laporan Koordi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest SKPD	19 Laporan	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	450,000,000
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	250,000,000
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	150,000,000
2	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Orang	50,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,135,000,000
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	45,000,000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	120,000,000
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	20,000,000
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	550,000,000
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	100 Persen	1,125,000,000
2	07	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	925,000,000
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kntor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	100 Persen	1.020,000,000
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	10,000,000
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Dibayar	1 Dokumen	650,000,000
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	360,000,000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	100 Persen	630,000,000
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	70,000,000
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	261,460,000
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	47 Persen	100,000,000
2	07	02	1.01		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Kab/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	17 Kab/Kota	100.000.000
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	100.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,16 Persen	340,000,000
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kompetensi yang Ditempatkan	30 Persen	340,000,000
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	32	240,000,000
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	100,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	45 %	555,000,000
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	70 Persen	200, 000,000
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Layanan AKD,AKL dan ULD	25 Orang	25,000,000,000
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	225,000,000

2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencaker yang ditempatkan	80 Persen	300,000,000
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar kerja online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	50,000,000
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	250,000,000
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI yang di tempatkan dan mendapatkan perlindungan	80 Persen	75,000,000
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	75,000,000
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah	80 Persen	80,000,000
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	80,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2024	Pagu Indikatif
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang menerapkan Tata Kelola kerja yang layak	38 %	243,000,000
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	38 Persen	100,000,000
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit Dibina	1 LKS	100,000,000
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK	1 Dokumen	143,000,000
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Dokumen	143,000,000
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	66 %	525,000,000
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan	120 Perusahaan	525,000,000
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)	120 Perusahaan	225,000,000

2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	200,000,000
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	158 Kasus	100,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			200,000,000
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya	100 %	200,000,000
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi	100	200,000,000
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Yang Bisa dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	5 Dokumen	200,000,000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya	1 SP	210,000,000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya	1 SP	210,000,000
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3	85,000,000

3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	62 Orang	75,000,000
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah kepala keluarga transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi	31 KK	50,000,000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman Yang Dibina	1 SP	50,000,000
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase peningkatan penataan persebaran penduduk wilayah transmigrasi	50 Persen	50,000,000
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	21 KK	50,000,000
TOTAL								33,250,593,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini disusun sebagai masukan guna mendukung agenda pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dan memantapkan pelaksanaan kebijakan dan program-program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja ini perlu dijabarkan secara cermat dengan memperhatikan perkembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigran khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINISI SUMATERA SELATAN,

DELIAR RIZQON, ST,MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19711003 200501 1 007